

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Gie, The Liang, (1967) *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Hasal, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kencana, I. (2013). *Ilmu Negara Kajian Ilmiah dan Keagamaan*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Koton, Y. P. (2019). *Restrukturisasi Organisasi: Teori dan Aplikasi dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Buku Pendidikan Deepublish.
- Nomensen Sinamo, 2012, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Jakarta: Permata Aksara.
- Setiawan, I. (2018). *Handbook pemerintahan daerah*. Wahana Resolusi.
- Soerjono Soekanto, (2012) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: IU Press.
- Utang Rosidi. 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal

- Abidin, B., & Herawati, R. (2018). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang. *Law Reform*, 14(2), 248-261.
- Benny Abidin, Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda Mengenai APBD Di Kabupaten Batang, *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum* Vol. 14, No. 2, Tahun 2018 FH-UNDIP,
- Budiyono Budiyono, 'Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.368>.
- Erik Porawouw, 'Tugas Dan Fungsi DPRD Propinsi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Menurut UU No. 27 Tahun 2009"', *LEX ADMINISTRATUM* 2, no.2 (30 May 2014) : 52, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/4738>.
- Kartiwa, H. A. (2006). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Rangka Mewujudkan "Good Governance". *Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia*, 1-23.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 'Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD' (Jakarta, June 2006).
- Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan Dprd terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(1),
- Murdani, M., & Suherlan, A. (2014). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Apbd Kabupaten Aceh Besar Pada Periode 2008-2012. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2).
- Natasya, A., Putri, T., Siahaan, R. P. J., & Khoirunnisa, A. (2022). Filsafat Ilmu dan Pengembangan Metode Ilmiah. *Mahaguru: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 3(1).

Rajagukguk, P., Simbolon, S., Rogers, M., & Munthe, H. (2022). IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH. DIKTUM, 1(1).

Rembu, Y., Rusmiwari, S., & Setyawan, D. (2020). Pola Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) pada Bidang Pendidikan di Kota Malang. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 1(1).

Tarigan, U. A. P. (2017). Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Asahan (Studi di DPRD Kabupaten Asahan) (Doctoral dissertation).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Berita

Luruskan Polemik SPI, Bupati Panggil Seluruh Kepala Sekolah Negeri.
<https://ppid.purbalinggakab.go.id/luruskan-polemik-spi-bupati-panggil-seluruh-kepala-sekolah-negeri/>. Diakses pada 1 Oktober 2023

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Jl. Jambukarang No. 8 Telp (0281) 891450 Purbalingga 53311

Purbalingga, 28 Desember 2023

Nomor : 071/395/2023
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
1. Sekretaris Sekretariat Dprd
di
P U R B A L I N G G A

Menindaklanjuti surat rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor 071/425/2023 tanggal 27 Desember 2023, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa pada Instansi Bapak / Ibu akan dilaksanakan Penelitian / Pra Survey oleh :

Nama : Asniar Ridha Indana
NIM/NIDN/NIP : 11000120120129
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Bancar, rt.03 rw.05, Purbalingga RT 03/ RW 05 Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga
E-Mail / No.HP : asniar.ra@gmail.com / 081903782215
Lokasi : Kabupaten Purbalingga
Judul / Tujuan : *FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA*
Waktu : Desember 2023 - Maret 2024
Catatan : -

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon perkenan Bapak/Ibu agar yang bersangkutan untuk dapat kiranya difasilitasi. Setelah selesai, yang bersangkutan berkewajiban melaporkan hasil Penelitian/Pra Survey kepada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuan dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA



Drs. SUROTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700203 199001 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbang dan Politik
2. Pimpinan UNIVERSITAS DIPONEGORO
3. Sdr. Asniar Ridha Indana



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

Purbalingga, 27 Desember 2023

Nomor : 071/425/2023
Sifat : biasa
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten
Purbalingga
di
P U R B A L I N G G A

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian, bersama ini Terlampir Disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor : 071/425/2023 atas Nama : **ASNIAR RIDHA INDANA** Dengan Judul : *FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA* untuk dapat ditindak lanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
<script>alert('Jabatan')</script>



<SCRIPT>ALERT('PANDI')</SCRIPT>
<script>alert('Pangkat')</script>
NIP. 196907171991011001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Bupati Purbalingga
2. Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga
3. Sdr. Asniar Ridha Indana



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jambu Karang No. 2 Telp (0281) 893117 Purbalingga 53311

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 071/425/2023

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Dari UNIVERSITAS DIPONEGORO Nomor : 517/UN7.F1/AK/XII/2023 Tanggal 20 Desember 2023.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, memberikan rekomendasi kepada :

- Nama : Asniar Ridha Indana
NIM/NIDN/NIP : 11000120120129
Alamat : Bancar, rt.03 rw.05, Purbalingga RT 03 RW 05, Kec. Purbalingga, Purbalingga, Jawa Tengah.
Untuk : Melakukan Izin Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Judul Penelitian : FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA
b. Bidang Penelitian : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
c. Waktu Penelitian : Desember 2023 - Maret 2024
d. Penanggung Jawab : Asniar Ridha Indana
e. Status Penelitian : Baru
f. Anggota Peneliti : -
g. Nama Lembaga : UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan sebagai obyek lokasi;
b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
c. Setelah kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksana kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus dilakukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
<script>alert('Jabatan')</script>



<script>alert('Pandi')</script>
<script>alert('Pangkat')</script>
NIP. 196907171991011001